

## Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mitra Usaha Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan

\* Siswan Ahmad Safutra<sup>1</sup>, Septa Juliana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

<sup>2</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

\*Corresponding Author : siswanahmadsafutra831@student.uir.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan Untuk mengetahui tentang Evaluasi Pengelolaan dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Pengelolaan BUMDes Mitra Usaha Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini menggunakan Teori Evaluasi Dunn 2013 dengan metode Penelitian Kualitatif dan adapun hasil penelitian ialah Efektifitas dari usaha yang dimiliki oleh BUMDes Mitra Usaha Desa Tambak berdasarkan hasil pengamatan penulis untuk program yang dimiliki oleh BUMDes Desa Tambak masih jauh tertinggal dari desa-desa tetangga. Efisiensi Perkembangan usaha BUMDes tidak berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya modal BUMDes apalagi jika dibandingkan dengan program-program usaha yang dimiliki oleh BUMDes desa lain. Kecukupan Program yang di adakan oleh BUMDes di harapkan mampu untuk meningkatkan perkembangan perekonomian Masyarakat . Pemerataan Program yang dipilih sebagai usaha milik BUMDes sudah melalui pertimbangan yang matang dan dipilih lah suatu program yang bisa dimanfaatkanoleh seluruh masyarakat Desa Tambak sehingga pemerataan dapat dilakukan dengan baik. Responsivitas Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa saya selaku kepala desa di tunjuk sebagai dewan penasehat. Ketepatan masyarakat Untuk saat ini walaupun dengan modal seadanya program BUMDes berjalan dengan baik dan terus berkembang walaupun usaha-usaha yang lain belum dapat di jalankan serta manfaatnya juga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat desa Kendala Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Badan Usaha Milik Desa Mitra Usaha Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan antara lain sebaga berikut: Penghambat yang paling utama adalah kurangnya sumber modal untuk mengembagkan usaha atau mengembakan program-program Badan Usaha Milik Desa.

**Kata Kunci:** BUMDes Dana Desa, Evaluasi, Pengelolaan

### Abstract

*This study was conducted to find out about Management Evaluation and to find out the obstacles in the implementation of BUMDes Management Mitra Usaha Desa Tambak, Langgam District, Pelalawan Regency. This study uses Dunn's 2013 Evaluation Theory with a Qualitative Research method and the results of the study are the effectiveness of the business owned by BUMDes Mitra Usaha Desa Tambak based on the author's observations for the programs owned by BUMDes Desa Tambak is still far behind neighboring villages. Efficiency The development of BUMDes businesses is not going well due to the lack of BUMDes capital, especially when compared to business programs owned by other village BUMDes. The adequacy of the programs held by BUMDes is expected to be able to improve the development of the community's economy. Equity The program chosen as a BUMDes-owned business has gone through careful consideration and a program was chosen that can be utilized by the entire Tambak Village community so that equity can be carried out properly. Responsiveness In the management of Village-Owned Enterprises, I, as the village head, was appointed as an advisory board. Community accuracy For now, even with limited capital, the BUMDes program is running well and continues to grow, although other businesses have not been able to be run and its benefits can also be felt by all levels of village society. Obstacles in Human Resource Development in Village-Owned Enterprises Mitra Usaha Desa Tambak, Langgam District, Pelalawan Regency include the following: The main obstacle is the lack of capital sources to develop businesses or develop Village-Owned Enterprise programs.*

**Keywords :** BUMDes Village Funds, Evaluation, Management

## PENDAHULUAN

Di Kecamatan Langgam ada delapan desa yang terdiri dari dari Desa Tambak (BUMDes Mitra Usaha), Desa Sotol (BUMDes Karya Mandiri), Desa Segati (BUMDes Jaya Mandiri), Desa Langkan (BUMDes Langkan Sejahtera), Desa Gondai (BUMDes Danau Kancil), Desa Penarikan (BUMDes Wahana Sejahtera), Desa Padang Luas (BUMDes Maju Bersama) dan yang terakhir ialah Kelurahan langgam (UED-SP). Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan merupakan sebuah desa yang tentunya memiliki aliran dana untuk pengelolaan desa yang diberikan dari pemerintah daerah. BUMDes Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dibentuk pada tahun 2011 dan saat ini beroperasi berdasarkan Peraturan Desa Nomor 040.a Tentang Pengelolaan Badan Usaha Mitra Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan maka sejak saat itu dibawah ini akan di jabarkan tentang jumlah Dana desa sejak tahun 2011 hingga tahun 2022

**Tabel 1**  
**Kepemilikan Modal Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan**

No	Tahun	Sember Dana Desa	Untuk Usaha	Nominal (Rupiah)
1	22021	Bankeu provinsi	BRI Link	59.000.000
2	2022	Bankeu provinsi	BRI Link	68.975.000
Total Penyertaan Modal				841.425.000
Pengembangan modal sampai tahun 2022				29.376.276
<b>Total Modal Awal+Pengembangan Usaha</b>				<b>870.801.267</b>

Sumber : Pemerintahan Desa Tambak Tahun 2024

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa:

- Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang nantinya digunakan desa untuk melakukan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan.
- Alokasi Dana Desa adalah dana desa yang bersumber dari APBD yang untuk melakukan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan.
- Penyertaan dana BUMDes adalah dana desa yang dijadikan modal untuk BUMDes yang memiliki tujuan sebagai penggerak ekonomi masyarakat

Artinya dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa dana yang didapatkan oleh desa dari tahun ketahun mengalami peningkatan hanya pada tahun 2022 yang mengalami penurunan dana desa. Namun dengan demikian kita lihat berbanding terbalik dengan dana yang diarahkan menjadi modal BUMDes. Dari tahun 2019 hingga tahun 2022 pengaliran dana yang dijadikan modal untuk BUMDes terus menurun namun dengan demikian modal BUMDes dari tahun ketahun terus ditambahkan.

Melihat persoalan tersebut dengan dana yang terus diarahkan kepada BUMDes namun kenapa pada BUMDes Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tidak pernah memberikan Informasi kepada masyarakat tentang program-program yang mereka miliki. Sejak tahun 2022 masyarakat hanya mengetahui bahwa program yang dimiliki BUMDes hanyalah melakukan pengelolaan simpan pinjam, Pom Mini dan usaha Warung BRI Link. Jika dilihat dari modal yang dimiliki dan terus ditambah dari tahun

ketahun seharusnya BUMDes tersebut memiliki program-program lain yang bermanfaat bagi masyarakatnya.

**Tabel 2**  
**Data Program BUMDes Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Sejak Tahun 2010-2024**

No	Jenis Program	Keterangan
1	Simpan Pinjam	Masih berjalan
2	Bri Link	Masih berjalan
3	Mitra Usaha dengan masyarakat	Masih berjalan

Sumber: BUMDes Desa Tambak tahun 2024

Adapun bentuk syarat-syarat simpan pinjam yang dimiliki BUMDes Mitra Usaha Desa tambak yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy KTP dan KK,
2. Pas foto 3x4 (2 lembar)
3. Bersedia menanda tangani dan melaksanakan fakta integritas
4. Hasil tim verifikasi
5. Jaminan kredit (sertifikat, BPKB, barang tidak bergerak dll.)

Pengelolaan BUMDes sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 tidak berkembang dengan baik dapat dilihat dari perkembangan laba pada tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Data Informasi Laba BUMDes Desa Tambak tahun 2022**

No	Uraian	Tahun 2022
1	Jumlah omset	Rp. 870. 351.276
2	Jumlah pendapatan kotor	Rp. 29.376.267
3	Jumlah pendapatan bersih	Rp. 25.664.291
4	Jumlah pemasukan ke PADes	Rp. 2.566.429
5	Sosial kemasyarakatan	Rp. 1.539.857

Sumber: BUMDes Desa Tambak Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat kita lihat dari penyertaan modal tahun 2021 sebesar Rp. 870. 351.276 hanya diperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. 25.664.291 dan sebesar Rp. 609.748.900 merupakan dana yang masih ada pada piutang pihak ketiga. Sumbangan BUMDes kepada PADes (Pendapatan Asli Desa) hanya sebesar 2.566.429 dan untuk sosial kemasayarakatan hanya sebesar Rp. 1.539.857. Maka dengan demikian pada tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa dari penyertaan modal sebesar Rp. 870. 351.276 hanya diperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. 25.664.291 merupakan suatu keuntungan yang tergolong kecil serta sumbangan untuk PADes (Pendapatan Asli Desa) dan sumbangan sosial masyarakat hanya sekitar Rp. 4.106.304 berarti dengan demikian penyertaan modal yang diberikan tidak seimbang dengan hasil yang diterima oleh desa maka dengan demikian program yang dilaksanakan oleh BUMDes belum memberikan manfaat yang signifikan pada pengelolaan keuangan desa.

Berbeda dengan BUMDes Desa lainnya yang berada di Kecamatan Langgam sudah berjalan dengan baik dan memiliki banyak bidang usaha. Salah satunya adalah BUMDes Desa Sotol, ada beberapa program lain antara lain sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Unit Usaha BUMDes Desa Sotol**

No	Jenis Usaha
1	Unit Usaha Simpan Pinjam
2	Brilink
3	Sumur Bor/PDAM
4	Mitra Usaha (alat tani, pupuk, racun,tanaman dll)
5	Depot air minum
6	Jasa sewa mobil pick UP

Sumber : BUMDes Desa Tambak Tahun 2025

Dari table di atas dapat dilihat bahwa sumber pendapatan BUMDes Desa Sotol lebih banyak dibandingkan desa Tambak dan BUMDes Desa Sotol lebih berkembang dari pada BUMDes Desa Tambak. Maka dengan permasalahan yang telah disebutkan diatas maka penulis menemukan beberapa fenomena-fenomena didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak Adanya perkembangan dalam program-program BUMDes yang dimiliki oleh BUMDes Desa Tambak
- 2) Laba yang dihasilkan oleh BUMDes Desa Tambak tergolong kecil dan belum menghasilkan manfaat yang besar bagi perkembangan perekonomian Desa
- 3) Tidak adanya akses bagi masyarakat Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan untuk mengetahui dan mengenal pengelolaan dana BUMDes.
- 4) Tidak adanya laporan yang dilakukan oleh Direktur BUMDes terhadap pengelolaan dan penggunaan anggaran BUMDes.
- 5) Tidak adanya perkembangan atau program-program BUMDes terbaru selama waktu 14 Tahun berdiri.

## METODE

Metode penelitian ilmiah merupakan keseluruhan metode dan teknik yang digunakan oleh peneliti mulai dari metode penentuan masalah hingga teknik analisa yang digunakan dalam penelitian penulis nantinya. Ketentuan metode penelitian ini biasanya mengikuti metode penelitian-penelitian terdahulu yang sudah disebutkan dalam beberapa literasi-literasi yang membahas tentang metode penelitian.

Keseluruhan metode beserta teknik-teknik penulisan dilakukan dengan menggunakan teknik yang digunakan didalam usulan penelitian, dan skripsi nantinya harus disertai dengan menyebutkan uraian interpretasi atau penjelasan argumentatif yang rasional valid dan dapat dipertanggungjawabkan tingkat keilmiahannya. Tolak ukur yang digunakan untuk penilaian tingkat kebenaran dari suatu penelitian adalah dikenal dengan tingkat objektifitas suatu kebenaran dan argumentatif penelitian. Penelitian mengandung nilai-nilai kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini maksudnya ialah memberikan analisis data yang memberikan penjelasan tentang nilai, makna dari makna yang terkandung dibalik keberadaan fisik maupun suatu data. serta uraian penjelasan hasil penelitian yang dikemukakan atau dicantumkan didalam penelitian ini nantinya (Aminah, S. 2019:20).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang dibentuk berdasarkan permusyawaratan desa yang memiliki tujuan untuk mengelola dan mengembangkan potensi desa dan sumberdaya yang dimiliki oleh desa. BUMDes dikelola langsung oleh perangkatnya yang juga diambil dari masyarakat desa dan BUMDes dapat melakukan

kerjasama antar BUMDes ataupun antar pribadi. Menurut Maryunani BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Seprianti Ratna Anggara, 2021:35).

Berdasarkan Undang-undang No 6 tahun 2014 modal BUMDes yang sebagian atau seluruhnya berasal dari dana desa yang telah dipisahkan sebelumnya. BUMDes memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan pengembangan ekonomi desa. Menurut Dewi bumdes merupakan badan usaha yang dimiliki oleh desa sebagai penggerak ekonomi di desa. Pembentukan bumdes bertujuan untuk memajukan perekonomian desa, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, membuka program kredit dan memberikan kontribusi kepada desa.

Pembentukan BUMDes tentunya juga tidak akan berjalan dengan lancar tanpa hambatan sedikitpun ada beberapa faktor yang menjadi penghambat yang ditemui dalam pengelolaan BUMDes yang secara umum dapat dilihat yaitu terkendala pada modal, sumberdaya alam yang tidak ada, sumber daya manusia yang kurang memadai, tidak adanya sumber daya lain, kinerja pengurus dan pengelola BUMDes serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam memajukan BUMDes.

Evaluasi adalah suatu cara atau proses yang terjadi untuk melihat suatu sistem kebijakan yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan tujuan tertentu yang melakukan membuat rumusan masalah pada suatu kebijakan, melakukan implementasi kebijakan, dan melakukan monitoring atau juga biasa disebut pengawasan terhadap implementasi suatu kebijakan yang telah ditetapkan (Dunn, 2013). Beberapa Kriteria yang harus dilakukan dalam Evaluasi Pengelolaan BUMDes Mitra Usaha Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan adalah mengenai :

### 1. Efektifitas

Efektifitas merupakan suatu tolak ukur yang digunakan untuk melihat apakah suatu kebijakan yang telah dilakukan sudah mencapai tujuan yang diinginkan dan apakah kebijakan yang diambil tersebut telah tepat sasaran dan masalah yang ada ditengah-tengah masyarakat dapat di selesaikan dengan baik.

Efektifitas merupakan suatu tolak ukur yang digunakan untuk melihat apakah suatu kebijakan yang telah dilakukan sudah mencapai tujuan yang diinginkan dan apakah kebijakan yang diambil tersebut telah tepat sasaran dan masalah yang ada ditengah-tengah masyarakat dapat di selesaikan dengan baik. Menurut William N Dunn mengatakan bahwa ada beberapa kriteria yang diperlukan untuk memenuhi proses evaluasi kebijakan publik adapun pendapat William N Dunn adalah Efektifitas ini berkaitan dengan suatu hasil apakah suatu alternatif kegiatan yang dilakukan itu sudah mencapai hasil yang di targetkan atau setidaknya telah mencapai tujuan dari kegiatan tersebut dibuat. Pengukuran dari tingkat efektifitas ini biasanya menggunakan unit produk ataupun nilai dari suatu produk tersebut dimata orang lain (Dunn. 2003).

Berdasarkan definisi efektifitas yang disampaikan oleh William N Dunn dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu penilaian yang dilakukan terhadap suatu tindakan yang di ambil apakah hasil dari tindakan tersebut telah mencapai tujuan yang kita inginkan dan kita tetapkan dalam suatu kegiatan tersebut.

Sedangkan menurut pendapat efendi efektifitas merupakan suatu pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan tepat sesuai anggaran, Waktu yang telah ditetapkan serta jumlah personil yang ditentukan. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektifitas menurut efendi adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan anggaran, waktu dan personil yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ada beberapa sub indikator dalam menjawab indikator efektifitas adapun sub indikator tersebut antara lain sebagai berikut:

**a. Program yang dimiliki BUMDes Sistem pengelolaan BUMDes**

Observasi dalam penelitian ini berkaitan dengan Program yang dimiliki BUMDes Sistem pengelolaan BUMDes antara lain sebagai berikut: Berdasarkan hasil pengamatan penulis untuk program yang dimiliki oleh BUMDes Desa Tambak masih jauh tertinggal dari desa-desa tetangga, BUMDes didesa lainnya memiliki mini market kios alat pertanian hingga memiliki lahan sawit yang mana hasil panennya diberikan kepada BUMDes dan yang menjadi buruh panennya ialah masyarakat desa tersebut yang dengan demikian program BUMDes juga memiliki fungsi untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Analisa dalam sub indikator Program yang dimiliki BUMDes Sistem pengelolaan BUMDes ialah sebagai berikut: usaha yang dimiliki oleh BUMDes Mitra Usaha Desa Tambak antara lain ialah kedai brilink, usaha simpan pinjam serta berbagai mitra usaha yang dilakukan bersama Masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan penulis untuk program yang dimiliki oleh BUMDes Desa Tambak masih jauh tertinggal dari desa-desa tetangga, BUMDes didesa lainnya memiliki mini market kios alat pertanian hingga memiliki lahan sawit yang mana hasil panennya diberikan kepada BUMDes dan yang menjadi buruh panennya ialah masyarakat desa tersebut yang dengan demikian program BUMDes juga memiliki fungsi untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

**b. Proses pengelolaan BUMDes**

Analisa dalam sub indikator Proses pengelolaan BUMDes ialah sebagai berikut: dalam mendukung kemajuan pemberdayaan masyarakat desa melalui program Badan Usaha Milik Desa ialah peran kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mitra Usaha sudah disebutkan secara terperinci didalam pasal 11 hingga pasal 13 Peraturan Desa Tambak Nomor 040.A.1 Tahun 2022 Tentang Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Mitra Usaha namun pada kenyataannya tugas tersebut kurang dijalankan dengan baik kepala desa sebagai penasehat dan pengawas kurang menjalankan perannya terbukti dengan tidak adanya perkembangan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa bahkan Pada awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa Mitra Usaha ini mereka memiliki unit usaha Pertamina untuk mrmudahkan Masyarakat dalam melakukan pengisian bahan bakam namun sejak tahun 2021 usaha tersebut sudah tidak di jalankan lagi dengan alasan bahwa usaha tersebut tidak menghasilkan laba yang ditargetkan oleh pemerintah desa sedangkan usaha tersebut juga tidak digantikan dengan usaha lainnya. Selain itu program-program yang mendukung pemberdayaan Masyarakat seperti pelatihan dan Kemahiran dalam melakukan sebuah profesi tidak pernah dilakukan dan juga unit usaha yang dimiliki saat ini hanyalah warung brilink yang tentunya tidak mendukung terhadap pemberdayaan Masyarakat maka dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa bukan hanya program BUMDe Mitra Usaha yang harus melakukan evaluasi namun juga peran kepala desa sebagai pengawas dan juga penasehat harus lebih di tingkatkan.

**2. Efisiensi**

Efisiensi ini adalah tolak ukur untuk melihat apakah efektivitas yang telah dinilai sebelumnya sudah efektif atau belum. Efisiensi ini adalah tolak ukur untuk melihat apakah efektivitas yang telah dinilai sebelumnya sudah efektif atau belum. Efisiensi berhubungan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efisininensi tersebut. Efisiensi itu sendiri merupakan hubungan antara tingkat efektifitas dengan usaha yang digunakan. Efisiensi itu merupakan sumber daya yang digunakan untuk menghitung suatu keberhasilan dan efektifitas tertinggi. Efisiensi ini biasanya dihitung dengan menggunakan perhitungan keberhasilan perunit hasil dari suatu kegiatan yang dilakukan (Dunn, 2003).

Dari pengertian yang disampaikan oleh William N Dunn. Dapat disimpulkan bahwa defenisi dari efisiensi adalah jumlah besaran usaha yang dilakukan untuk mencapai efektifitas. Hubungan antara Efisiensi dengan Efektifitas adalah melihat efektifitas berdasarkan jumlah usaha yang digunakan untuk mencapai efisiensi tersebut serta berapa banya sumber daya yang digunakan untuk mencapai dari sebuah efektifitas.

Selain Willian M Dunn Malayu SP Hasibuan juga memiliki pendapat tentang apa itu Efisiensi menurutnya adalah perbandingan antara usaha yang dilakukan dengan hasil yang didapat. Atau juga dapat dilihat besaran sumber daya yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang optimal yang pada dasarnya hasil harus lebih besar dari pada sumber daya yang digunakan.

Ada beberapa sub indikator dalam menjawab indikator efisiensi adapun sub indikator tersebut antara lain sebagai berikut:

### **Perkembangan program BUMDes**

Observasi dalam penelitian ini berkaitan dengan Perkembangan program BUMDes antara lain sebagai berikut: dari hasil pengamatan penulis melihat bahwa setiap usaha yang dilakukan oleh BUMDes terus berjalan namun memang untuk perkembangan usaha menjadi terhambat dikarenakan kurangnya penyertaan modal usaha yang dimiliki BUMDes oleh desa. Setiap usaha yang dilakukan oleh BUMDes terus berjalan namun memang untuk perkembangan usaha menjadi terhambat dikarenakan kurangnya penyertaan modal usaha yang dimiliki BUMDes oleh desa.

Analisa dalam sub indikator Perkembangan program BUMDes ialah sebagai berikut: Perkembangan usaha BUMDes tidak berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya modal BUMDes apalagi jika dibandingkan dengan program-program usaha yang dimiliki oleh BUMDes desa lain yang memiliki banyak program usaha seperti adanya minimarket dan adanya kios alat pertanian. setiap usaha yang dilakukan oleh BUMDes terus berjalan namun memang untuk perkembangan usaha menjadi terhambat dikarenakan kurangnya penyertaan modal usaha yang dimiliki BUMDes oleh desa.

### **3. Kecukupan**

Kecukupan ini merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menghitung jumlah dari suatu efektifitas yang telah dilihat sebelumnya yaitu mengenai kecukupan nilai, pemuasan kebutuhan, serta adanya kemungkinan tumbuhnya masalah baru atas dasar kurangnya kecukupan tersebut. Kecukupan ini merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menghitung jumlah dari suatu efektifitas yang telah dilihat sebelumnya yaitu mengenai kecukupan nilai, pemuasan kebutuhan, serta adanya kemungkinan tumbuhnya masalah baru atas dasar kurangnya kecukupan tersebut. Kriteria yang digunakan untuk melakukan sebuah evaluasi kebijakan publik kecukupan memiliki maksud ialah suatu tingkat dari efektifitas yang dimiliki oleh suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan, nilai yang baik atau seberapa besar masalah yang timbul akibat dari perbuatan itu dilaksanakan. Kecukupan yang dimaksud disini adalah kinerja apakah kinerja yang dimiliki pegawai sebanding dengan apa yang dibutuhkan untuk mencapai target dari tujuan yang telah di tetapkan (Dunn, 2003).

Pengertian dari kecukupan yang disampaikan oleh Budi Winarno adalah kecukupan yang dirasakan telah mencukupi berbagai hal yang diperlukan oleh semua pihak. Kecukupan ini berubungan dengan berapa besar jumlah efektifitas yang dapat memenuhi kebutuhan, nilai serta kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan ini digunakan untuk bagaimana cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah apakah sudah efektif dan efisien atau tidak (Winarno, 2002).

Ada beberapa sub indikator dalam menjawab indikator kecukupan adapun sub indikator tersebut antara lain sebagai berikut:

#### **b. Manfaat program BUMDes bagi masyarakat**

Observasi dalam penelitian ini berkaitan dengan Manfaat program BUMDes bagi masyarakat antara lain sebagai berikut: usaha BUMDes bermanfaat karena brilik memudahkan masyarakat dan usaha simpan pinjam yang diberikan mampu membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya.

Analisa dalam sub indikator Manfaat program BUMDes bagi masyarakat ialah sebagai berikut: Program yang di adakan oleh BUMDes di harapkan mampu untuk meningkatkan perkembangan perekonomian Masyarakat seperti usaha simpan pinjam yang diberikan kepada Masyarakat untuk mengembangkan usahanya dan di adakan kios brilink juga bertujuan untuk membantu Masyarakat agar lebih mudah melakukan transfer dan Tarik tunai sehingg tidak perlu jauh-jauh pergi keluar dari desa.

#### **c. Penilaian masyarakat terhadap kinerja pengelolaan BUMDes**

Observasi dalam penelitian ini berkaitan dengan Penilaian masyarakat terhadap kinerja pengelolaan BUMDes antara lain sebagai berikut: masyarakat sangat antusias memanfaatkan program-program yang dimiliki oleh BUMDes dan selalu berperan aktif untuk membantu mengembakan usaha BUMDes tersebut.

Analisa dalam sub indikator Penilaian masyarakat terhadap kinerja pengelolaan BUMDes ialah sebagai berikut: masyarakat sangat mendukung atas seluruh program yang dimiliki oleh BUMDes dan masyarakat merasa program-program BUMDes dapat membantu pertumbuhan perekonomian desa dan program-program BUMDes juga dapat memudahkan masyarakat Desa Tambak maka harapan masyarakat kepada BUMDes.

### **4. Pemerataan**

Pemerataan disini maksudnya apakah suatu kebijakan dan pembagian yang dilakukan dalam mengambil suatu kebijakan tersebut apakah sudah merata atau masih ada yang belum tercover secara keseluruhan. Pemerataan disini maksudnya apakah suatu kebijakan dan pembagian yang dilakukan dalam mengambil suatu kebijakan tersebut apakah sudah merata atau masih ada yang belum tercover secara keseluruhan. Pemerataan memiliki hubungan yang erat dengan rasionalitas yang legal, kehidupan sosial serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok masyarakat yang hidup dalam suatu daerah (Dunn, 2003).

Dapat disimpulkan dari definisi di atas bawah pPemerataan memiliki hubungan yang erat dengan rasionalitas yang legal, kehidupan sosial serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok masyarakat yang hidup dalam suatu daerah. Yang termasuk kedalam pemerataan atau kesamaan tersebut adalah suatu akuntabilitas. Akuntabilita ini merupakan apakan perbuatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku.

Budi Winarno juga memberikan pengertian tentang apa itu yang dimaksud dengan kesamaan yaitu memiliki arti keadilan bagi seluruh masyarakat atau seluruh pihak yang terlibat. Kesamaan ini memiliki hubungan yang erat dengan ekuntabilitas yang dimiliki oleh setiap pekerja (Winarno, 2002).

Ada beberapa sub indikator dalam menjawab indikator pemerataan adapun sub indikator tersebut antara lain sebagai berikut:

#### **Semua masyarakat merasakan manfaat dari program-program BUMDes**

Observasi dalam penelitian ini berkaitan dengan Semua masyarakat merasakan manfaat dari program-program BUMDes antara lain sebagai berikut: pelanggan di kios brilink merupakan seluruh masyarakat desa tidak hanya mengirim dan menarik uang masyarakat desa juga bisa melakukan segala jenis pembayaran melalui brilink, seperti listrik, angsuran maupun biaya belanja online.

Analisa dalam sub indikator Semua masyarakat merasakan manfaat dari program-program BUMDes ialah sebagai berikut: Program yang dipilih sebagai usaha milik BUMDes sudah melalui pertimbangan yang matang dan dipilihlah suatu program yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Desa Tambak sehingga pemerataan dapat dilakukan dengan baik. Pelanggan di kios brilink merupakan seluruh masyarakat desa tidak hanya mengirim dan menarik uang masyarakat desa juga bisa melakukan segala jenis pembayaran melalui brilink, seperti listrik, angsuran maupun biaya belanja online.

## 5. Responsivitas

Responsivitas ini adalah untuk melihat seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah atau suatu kelompok yang memiliki tujuan tertentu terhadap suatu kegiatan yang dilakukan. Responsivitas ini adalah untuk melihat seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah atau suatu kelompok yang memiliki tujuan tertentu terhadap suatu kegiatan yang dilakukan. Responsivitas ini memiliki hubungan antara kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat (Dunn, 2003).

Berdasarkan keterangan dari William N Dunn Responsivitas disimpulkan sebagai seberapa besar kebijakan dapat menyelesaikan masalah yang telah terjadi, preferensi, atau nilai-nilai yang terkandung untuk mengenal kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat, mengatur kegiatan, atau mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan yang dimiliki oleh masyarakat.

Sementara itu Budi Winarno memberikan penjelasan tentang Responsivitas adalah respon dari suatu aktifitas yang dilaksanakan. Maksudnya adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dibandingkan dengan respon yang diberikan oleh masyarakat terhadap kegiatan tersebut. Responsivitas ini berhubungan dengan seberapa jauh hubungan yang dimiliki oleh kebijakan dan kepuasan yang berupa nilai, kebutuhan, preferensi atau nilai yang diberikan masyarakat kelompok tertentu. Yang mana keberhasilan tersebut dapat dinilai dari pengaruh dari kebijakan yang diambil serta bagaimana tanggapan masyarakat setelah dampak dari kebijakan tersebut apakah berbentuk dukungan ataupun penolakan (Winarno, 2002).

Ada beberapa sub indikator dalam menjawab indikator responsivitas adapun sub indikator tersebut antara lain sebagai berikut:

### Peran pemerintah desa dalam membantu perkembangan program BUMDes

Observasi dalam penelitian ini berkaitan dengan Peran pemerintah desa dalam membantu perkembangan program BUMDes antara lain sebagai berikut: kepala desa berperan menjadi pengawas dalam setiap program yang dijalankan oleh BUMDes. Pihak pengelola BUMDes memberikan laporan terhadap perkembangan program BUMDes kemudian dari laporan tersebut dilakukan evaluasi pengawasan oleh kepala Desa.

Analisa dalam sub indikator Peran pemerintah desa dalam membantu perkembangan program BUMDes ialah sebagai berikut: Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa saya selaku kepala desa ditunjuk sebagai dewan penasehat yang merupakan satu-satunya penasehat dalam melaksanakan program-program Badan Usaha Milik Desa yang manadalam tugas disebutkan dalam pasal 11 dan wewenang disebutkan dalam pasal 12 ayat serta hak yang dimiliki oleh dewan penasehat terdapat dalam pasal 13 Peraturan Desa Tambak Nomor 040.A.1 Tahun 2022 Tentang Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Mitra Usaha tentunya saya sebagai kepala desa dan sebagai penasehat akan menjalankan fungsinya dengan tugas saya dengan sebaik mungkin.

## 6. Ketepatan

Ketepatan ini akan berorientasi kepada apakah suatu kebijakan yang diambil telah tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Ketepatan ini akan berorientasi

kepada apakah suatu kebijakan yang di ambil telah tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Ketepatan ini merupakan suatu sasaran yang akan dituju oleh suatu program yang dilakukan oleh kantor desa. siapa saja yang mendapatkan bantuan dan siapa saja yang berhak mendapatkan surat keterangan usaha. Maka untuk pendapat masyarakat dan pendapat kantor desa terkait hal tersebut dapat dilihat melalui wawancara.

Ketepatan merupakan suatu hasil yang berhubungan dengan rasionalitas substantif yang merujuk kepada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan kebijakan tersebut. Sedangkan Winarno memberikan penjelasan tentang ketepatan itu merujuk kepada nilai atau harga diri dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang berdasarkan pada tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang digunakan untuk mengukur suatu ketepatan dapat dilihat dari hubungan yang rasional yang terjadi antara substansi tujuan dengan cara yang dilakukan untuk melibatkan suatu tujuan tersebut.

Ada beberapa sub indikator dalam menjawab indikator ketepatan adapun sub indikator tersebut antara lain sebagai berikut:

**Program BUMDes berkembang dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat.**

Observasi dalam penelitian ini berkaitan dengan Program BUMDes berkembang dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat antara lain sebagai berikut: walaupun usaha BUMDes hanyalah kios brilink tapi seluruh masyarakat merasa terbantu dan lebih mudah dalam melakukan transaksi keuangan dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program BUMDes Susah berhasil.

Analisa dalam sub indikator Program BUMDes berkembang dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat ialah sebagai berikut: Untuk saat ini walaupun dengan modal seadanya program BUMDes berjalan dengan baik dan terus berkembang walaupun usaha-usaha yang lain belum dapat di jalankan serta manfaatnya juga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat desa.

**Kendala dalam pelaksanaan Pengelolaan BUMDes Mitra Usaha Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan**

Dalam menjalankan sebuah program khususnya dalam pengelolaan Badan Usaha Unit Desa tentunya adanya hambatan yang di alami oleh pihak pengelola maka dengan begitu tidak lengkap jika dalam suatu penelitian hanya mencari permasalahan tanpa melihat hambatan yang menjadi penyebab permasalahan itu timbul yang mana hambatan tersebut di dapat melalu informasi dalam wawancara yang mana wawancaranya antara lain adah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dibuat sebuah analisa bahwa Hambatan Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Badan Usaha Milik Desa Mitra Usaha Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan antara lain sebaga berikut:

1. Penghambat yang paling utama adalah kurangnya sumber modal untuk mengembagkan usaha atau mengembakan program-program Badan Usaha Milik Desa.
2. Tugas kepala desa yang telalu banyak sehingga mengerjakan tugas untuk melakukan pengawasan dan penasehat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa menjadi tidak optimal.
3. Kemudian urangnya saran dan masukan yang membangun untuk pengembangan dan program yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa dan yang terakhir
4. Kurangnya peran serta Masyarakat dalam melakukan pemberdayaan dimana Masyarakat cenderung pasif dan tidak pernah mau terlibat dalam kegiatan yang

dilakukan oleh pemerintah desa hal tersebut juga di karenakan pemerintah desa juga kurang melibatkan dan mendengar aspirasi Masyarakat untuk membangun desa sehingga Masyarakat terkesan tidak peduli terhadap perkembangan desa.

## SIMPULAN

1. Efektifitas dari usaha yang dimiliki oleh BUMDes Mitra Usaha Desa Tambak antara lain ialah kedai brilink, usaha simpan pinjam serta berbagai mitra usaha yang dilakukan bersama Masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan penulis untuk program yang dimiliki oleh BUMDes Desa Tambak masih jauh tertinggal dari desa-desa tetangga, BUMDes didesa lainnya memiliki mini market kios alat pertanian hingga memiliki lahan sawit yang mana hasil panennya diberikan kepada BUMDes dan yang menjadi buruh panennya ialah masyarakat desa tersebut yang dengan demikian program BUMDes juga memiliki fungsi untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. dalam mendukung kemajuan pemberdayaan masyarakat desa melalui program Badan Usaha Milik Desa ialah peran kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mitra Usaha sudah disebutkan secara terperinci didalam pasal 11 hingga pasal 13 Peraturan Desa Tambak Nomor 040.A.1 Tahun 2022 Tentang Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Mitra Usaha namun pada kenyataannya tugas tersebut kurang dijalankan dengan baik kepala desa sebagai penasehat dan pengawas kurang menjalankan perannya terbukti dengan tidak adanya perkembangan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa bahkan Pada awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa Mitra Usaha ini mereka memiliki unit usaha Pertamina untuk mrmudahkan Masyarakat dalam melakukan pengisian bahan bakar namun sejak tahun 2021 usaha tersebut sudah tidak di jalankan lagi dengan alasan bahwa usaha tersebut tidak menghasilkan laba yang ditargetkan oleh pemerintah desa sedangkan usaha tersebut juga tidak digantikan dengan usaha lainnya. Selain itu program-program yang mendukung pemberdayaan Masyarakat seperti pelatihan dan Kemahiran dalam melakukan sebuah profesi tidak pernah dilakukan dan juga unit usaha yang dimiliki saat ini hanyalah warung brilink yang tentunya tidak mendukung terhadap pemberdayaan Masyarakat maka dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa bukan hanya program BUMDe Mitra Usaha yang harus melakukan evaluasi namun juga peran kepala desa sebagai pengawas dan juga penasehat harus lebih di tingkatkan.
2. Efisiensi Perkembangan usaha BUMDes tidak berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya modal BUMDes apalagi jika dibandingkan dengan program-program usaha yang dimiliki oleh BUMDes desa lain yang memiliki banyak program usaha seperti adanya minimarket dan adanya kios alat pertanian. setiap usaha yang dilakukan oleh BUMDes terus berjalan namun memang untuk perkembangan usaha menjadi terhambat dikarenakan kurangnya penyertaan modal usaha yang dimiliki BUMDes oleh desa. masyarakat sangat mendukung atas seluruh program yang dimiliki oleh BUMDes dan masyarakat merasa program-program BUMDes dapat membantu pertumbuhan perekonomian desa dan program-program BUMDes juga dapat memudahkan masyarakat Desa Tambak maka harapan masyarakat kepada BUMDes.
3. Kecukupan Program yang di adakan oleh BUMDes di harapkan mampu untuk meningkatkan perkembangan perekonomian Masyarakat seperti usaha simpan pinjam yang diberikan kepada Masyarakat untuk mengembangkan usahanya dan di adakan kios brilink juga bertujuan untuk membantu Masyarakat agar lebih mudah melakukan transfer dan Tarik tunai sehingga tidak perlu jauh-jauh pergi keluar dari desa. masyarakat sangat mendukung atas seluruh program yang dimiliki oleh BUMDes dan masyarakat merasa program-program BUMDes dapat membantu pertumbuhan

- perekonomian desa dan program-program BUMDes juga dapat memudahkan masyarakat Desa Tambak maka harapan masyarakat kepada BUMDes.
4. Pemerataan Program yang dipilih sebagai usaha milik BUMDes sudah melalui pertimbangan yang matang dan dipilihlah suatu program yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Desa Tambak sehingga pemerataan dapat dilakukan dengan baik. Pelanggan di kios brilink merupakan seluruh masyarakat desa tidak hanya mengirim dan menarik uang masyarakat desa juga bisa melakukan segala jenis pembayaran melalui brilink, seperti listrik, angsuran maupun biaya belanja online.
  5. Responsivitas Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa saya selaku kepala desa ditunjuk sebagai dewan penasehat yang merupakan satu-satunya penasehat dalam melaksanakan program-program Badan Usaha Milik Desa yang manadalam tugas disebutkan dalam pasal 11 dan wewenang disebutkan dalam pasal 12 ayat serta hak yang dimiliki oleh dewan penasehat terdapat dalam pasal 13 Peraturan Desa Tambak Nomor 040.A.1 Tahun 2022 Tentang Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Mitra Usaha tentunya saya sebagai kepala desa dan sebagai penasehat akan menjalankan fungsinya dengan tugas saya dengan sebaik mungkin.
  6. Ketepatan masyarakat Untuk saat ini walaupun dengan modal seadanya program BUMDes berjalan dengan baik dan terus berkembang walaupun usaha-usaha yang lain belum dapat dijalankan serta manfaatnya juga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat desa
  7. Kendala Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Badan Usaha Milik Desa Mitra Usaha Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan antara lain sebagai berikut:
    - a. Penghambat yang paling utama adalah kurangnya sumber modal untuk mengembangkan usaha atau mengembakan program-program Badan Usaha Milik Desa.
    - b. Tugas kepala desa yang terlalu banyak sehingga mengerjakan tugas untuk melakukan pengawasan dan penasehat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa menjadi tidak optimal.
    - c. Kemudian urangnya saran dan masukan yang membangun untuk pengembangan dan program yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa dan yang terakhir
    - d. Kurangnya peran serta Masyarakat dalam melakukan pemberdayaan dimana Masyarakat cenderung pasif dan tidak pernah mau terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa hal tersebut juga dikarenakan pemerintah desa juga kurang melibatkan dan mendengar aspirasi Masyarakat untuk membangun desa sehingga Masyarakat terkesan tidak peduli terhadap perkembangan desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminah, S. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kalitaturf Ilmu Politik*. Jakarta: Kencana
- Arikunto, S. (2006). *Menajemen Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Bungin, B. (2013). *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Dunn, W. N. (2013). *Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Eko, S. *Desa Membangun Indonesia. Forum Pengembanagan Pembaharuan Desa*.
- Herdiansyah, H. (2013). *Wawancara, Observasi dan Focus Groups : sebagai instrumen penggalan data kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kansil, C. (2001). *Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang DAsar*

1945 dan Ketetapan-Ketetapan MPR: telah disesuaikan dengan hasil SU MPR.  
Jakarta: Bumi Aksara.

- Moleong, L. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Munaf, Y. (2015). *Hukum Administrasi Negara* . Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Nawawi, H. (2011). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernologi Ilmu Pemerintahan* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Purwanto, H. (2019). *Pemimpin Dan Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Alqaprint Jatinangor.
- Ratminto. (2007). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rauf, R., & Maulida, S. (2015). *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa.
- Rusby, & Zulkifli. (2017). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sondang, S. (1985). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Mas agung .
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafi'i, I. K. (2002). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafie, I. K. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syaukani. (2002). *Kebijakan Publik Menggapai Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Mida Pustaka.
- Wasistino. (2006). *Proses Pengembangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wasistono, S. (2017). *Perkembangan Ilmu Pemerintahan (Dari Klasik Sampai ke Kontenporer)*. Sumedang: IPDN Press.
- Widjaja. (2008). *Otonomi Desa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdul Hakim (2022 )*Implementasi Peraturan Desa Way Galih Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Perspektif Fikih Siyasa (Studi Di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan)*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Annisa Fadilah (2016)*Implementasi Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Di Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Asna Anenta. *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PJKP) di Kota Gorontalo*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010
- Ayu Amelia Evaluasi. 2021 *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*. Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
- Haedar Akib. *Implementasi Kebijakan : apa, mengapa dan bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010
- Jasardi Gunawan (2022)*Implementasi Peraturan Desa Lawin No. 1 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Sury*. Jiip

(Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) (Eissn: 2614-8854) Volume 5, Nomor 8, Agustus 2022  
(3243-3251)

Rahmi Hidayati.2019. *Evaluasi Pelayanan Akte Kelahiran Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar*. Skripsi. Univeristas Islam Riau.

Rendi Saputra. 2019. *Implementasi Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar (Studi Kasus Pelayanan Akta Kelahiran)*. Skripsi. Universitas Islam Riau.

Seprianti Ratna Anggara. 2021 *Evaluasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Lestri di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singigi Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau*.